

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Transisi pertumbuhan antardaerah itu seharusnya saling menguntungkan. Dengan ini, perkembangan produksi, penduduk, dan modal tentunya berbanding lurus dari waktu ke waktu. Namun, pada realisasinya transisi pertumbuhan ekonomi antardaerah belum lancar. Hal ini dikarenakan masih adanya kecenderungan yang hanya terfokuskan pada daerah yang memiliki kebasis aglomerasi atau lokasi. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang difokuskan ini dengan harapan dapat berdampak positif bagi kegiatan pembangunan ekonomi nasional (Sjafrizal, 2017)

Inti dari penentuan pusat pertumbuhan adalah sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya terkonsentrasi di daerah yang memiliki potensi dan utilitas yang memadai guna mempercepat pengembangan ekonomi. Dikarenakan pertumbuhan suatu wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah sekitarnya.

(Suna'an dan Senuk, 2015) Mengatakan bahwa pembangunan wilayah merupakan salah satu realisasi pembangunan dengan tercapainya kesenjangan pembangunan antardaerah serta antarkawasan. Otonomi daerah merupakan bukti pemerintah dalam membangun daerah. Dalam berlangsungnya pembangunan dan pembangunan suatu Daerah pengaruh Otonomi Daerah sangat penting, karena dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta mengembangkan kegiatan dengan berdasarkan kekuatan daerah yang dimiliki.

Pada tingkat nasional maupun regional, proses pembangunan dan pertumbuhan dikatakan unsur yang sangat penting. Pada kenyataannya, antara kedua komponen ini selalu terjadi "*Trade-Off*" dimana ketika pertumbuhan lebih diutamakan maka aspek pemerataan akan di kurangi/dikebelakangkan, dan

sebaliknya ketika memprioritaskan pemerataan maka akan membelakangkan pertumbuhan ekonomi (Sjafrizal, 2017). Tentunya ini menjadi suatu permasalahan dimana, pembangunan suatu wilayah itu memerlukan keselarasan kedua aspek tersebut.

Dalam penelitian (Rahayu dan Santoso, 2014) guna merealisasikan pembangunan suatu wilayah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukannya pengembangan wilayah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan, teknologi sarana dan prasarana secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pengembangan wilayah ini adalah untuk meningkatkan pemerataan wilayah serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Dari segi pembangunan, ketimpangan pengembangan wilayah diatasi dengan membangun pusat pertumbuhan (*Growth Poles*). Menurut Sjafrizal hal ini, sesuai dengan konsep konsentrasi dan desentralisasi. Dimana konsep konsentrasi digunakan agar terjadi difusi kegiatan pembangunan lebih lanjut dengan mempertimbangkan efisiensi usaha. Sedangkan pada aspek desentralisasi digunakan agar penyebaran pembangunan antar wilayah tetap dilakukan dengan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah (sjafrizal, 2008)

Membangun perekonomian suatu Daerah merupakan strategi yang dirancang oleh pemerintah Daerah dalam menata sumberdaya dan menciptakan pola kemitraan pemerintah Daerah serta sektor swasta dalam merangsang pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru. Pendekatan pengembangan wilayah tertantum melalui penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatagunaan ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang mengatur peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, kelembagaan penataan ruang, serta pembinaan penataan ruang. Rencana umum tata ruang disusun secara berjenjang/hierarki yakni termasuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP),

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator dalam melihat pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak menjamin kestabilan kondisi ekonomi suatu daerah. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi dijadikan tolak ukur dalam menilai kebijakan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan perekonomian diikuti aspek dinamis.

Peranan lapangan usaha suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa tentunya sangat mempengaruhi struktur perekonomian suatu wilayah. Kontribusi suatu nilai tambah pada pembentukan struktur ekonomi juga melihat setinggi apa ketergantungan daerah tersebut pada kapasitas produksi setiap bidang usaha. Pada Provinsi Jambi struktur ekonominya sangat dipengaruhi oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan dan upaya suatu daerah dalam memproduksi setiap sektor sangat membentuk nilai tambah struktur ekonomi.

Terdapat empat sektor penyumbang PDRB terbesar di tahun 2020 di Provinsi Jambi, yaitu kategori pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk kategori pertanian, ada dua kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki peranan lebih dari 50 persen yaitu Kabupaten Kerinci dan Tebo dengan hasil perkebunan karet dan kelapa sawitnya. Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan daerah dengan peranan Kategori Pertanian di bawah 10% yaitu masing-masing sebesar 1,16 persen dan 5,02 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh sempitnya lahan pertanian yang mengakibatkan rendahnya produksi pertanian. Peranan pertanian di ibu kota provinsi, lebih kecil dibandingkan peranan selain pertanian. Industri pengolahan provinsi Jambi paling besar di sumbangkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi dan Kota Jambi. Kategori pertambangan terdapat dua Kabupaten sebagai penyumbang terbesar yaitu oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana banyaknya produksi minyak bumi, gas, batu bara

yang melimpah. Sedangkan untuk kategori perdagangan Provinsi Jambi banyak disumbangkan oleh Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo. (BPS Provinsi Jambi, 2020)

Pada pemberlakuan otonomi daerah membuat pemerintah provinsi Jambi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada kelanjutnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020 berada di antara minus 3,87 persen sampai 3,69 persen. Pandemi covid-19 telah merubah arah dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sebagian besar kabupaten/kota memperlihatkan nilai positif yang sedikit melambat bahkan sampai berkontraksi sehingga perekonomian di Provinsi Jambi pada 2020 juga mengalami hal yang sama. Laju Pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jambi pada tahun 2020 diduduki oleh Kabupaten Kerinci sebesar 3,69 persen. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah diduduki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu minus 3,87 persen.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 Kecamatan yang masing-masing memiliki potensi basis tersendiri dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi sumber daya alam. Sebagian besar lapangan usaha setiap kecamatan tanjung jabung barat adalah sektor pertanian, kehutan dan perikanan meskipun sejak tahun 2019 sektor ini di lampau oleh sektor pertambangan dan penggalian. Akan tetapi lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah tetap sketor pertanian, kehutanan dan perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hasil analisis topolgi klasen dalam penelitian (Etik Umiyati , 2012) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah penyumbang terbesar pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jambi karena terdapat industri kertas, yaitu *PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry (LPPI)* yang menjadi pemasok bahan baku untuk beberapa industri di provinsi lainnya.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memiliki pengolahan industri pengilangan migas satu-satunya di Provinsi Jambi.

Tabel 1.1 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Terhadap Total PDRB, 2016-2020 (persen)

| Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kerinci | 4,7 | 4,67 | 4,49 | 4,52 | 5,03 |
| Merangin | 7,08 | 7,11 | 6,9 | 6,97 | 7,55 |
| Sarolangun | 7,15 | 7,07 | 6,92 | 6,92 | 6,98 |
| Batanghari | 7,8 | 7,72 | 7,48 | 7,49 | 7,91 |
| Muaro Jambi | 11,18 | 11,21 | 10,96 | 11,08 | 11,8 |
| Tanjung Jabung Timur | 10,93 | 11,06 | 11,51 | 11,24 | 9,39 |
| Tanjung Jabung Barat | 18,36 | 18,75 | 19,79 | 19,61 | 17,88 |
| Tebo | 6,79 | 6,82 | 6,61 | 6,65 | 7,1 |
| Bungo | 8,39 | 8,42 | 8,26 | 8,16 | 8,36 |
| Kota Jambi | 14,25 | 13,82 | 13,75 | 13,96 | 14,35 |
| Kota Sungai Penuh | 3,35 | 3,35 | 3,32 | 3,41 | 3,64 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: *BPS Provinsi Jambi 2021*

Berdasarkan tabel Kontribusi PDRB Kabupaten/kota, pada tahun 2020 Kabupaten Tanjung Jabung barat merupakan penyumbang terbesar perekonomian di Provinsi Jambi dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 37,15 trilliun. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 17,88% terhadap PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pada tahun 2019 penopang terbesar perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung barat yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai BPRB atas dasar harga belaku Rp 11,19 triliun atau 30,14%. Kemudian disusul sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi Rp 9,99 triliun atau 26,9%.

Struktur Perekonomian Daerah Tanjung Jabung Barat pada 2019 bergerak dalam kategori Pertanian, Kategori Kehutanan dan Perikanan, Penambangan dan penggalian. pada kasus ini dapat dinilai dari ukuran masing-masing peran. Setiap bidang terhadap total PDRB Kabupaten di Tanjung Jabung Barat di mana kontribusi terbesar 2019 dalam Kategori Pertambangan dan

Penggalian tanah yaitu 38,18%. Kontribusi di tahun 2020 kembali diperankan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 30,14%. Gerakan ini terkait dengan: ekstraksi sumber daya alam, harga minyak dan gas dan minyak dan gas turun Itu turun secara signifikan pada tahun 2020.

Meningkatnya hasil produksi pada lapangan usaha perikanan, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu penyebab meningkatnya peranan lapangan usaha tersebut. Selain itu naiknya harga produk pada sektor ini dibandingkan dengan produk lain juga menjadi alasan untuk kembali meningkatnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 1.2 PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

| Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 27,72 | 27,32 | 24,61 | 25,08 | 30,14 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 33,03 | 34,46 | 39,32 | 33,13 | 26,9 |
| C. Industri Pengolahan | 19,29 | 18,6 | 17,24 | 16,89 | 19,83 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| F. Konstruksi | 4,5 | 4,51 | 4,42 | 4,68 | 5,46 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,07 | 4,02 | 3,84 | 4,01 | 4,51 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 0,89 | 0,37 | 0,8 | 0,83 | 0,88 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,47 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 1,89 | 1,92 | 1,9 | 2,07 | 2,57 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,2 | 1,13 | 1,02 | 1,03 | 1,26 |
| L. Real Estate | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,74 | 0,87 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,2 | 1,35 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1,83 | 1,79 | 1,72 | 1,85 | 2,18 |
| P. Jasa Pendidikan | 1,9 | 1,85 | 1,76 | 1,84 | 2,21 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,49 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,61 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 0,56 | 0,53 | 0,5 | 0,51 | 0,56 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Produk Domestik Regional Bruto Non Migas | 55,68 | 54,76 | 50,28 | 51,83 | 61,3 |

Sumber: BPS. Tanjung Jabung Barat Dalam Angka (2021)

Pada sektor-sektor yang menyumbangkan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Barat atas dasar harga berlaku, sektor pertanian menjadi kontributor paling besar yaitu 30,14 pada tahun 2020 belakang. Selain itu lapangan pekerja masyarakat Tanjung Jabung barat sebagian besar pada sektor pertanian. Supaya pengaplikasian kebijakan peningkatan sektor pertanian tercapai optimal, maka perlu menetapkan prioritas pengembangan komoditi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 1.3 Produksi Sektor Pertanian Menurut Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2016-2020)

| Kecamatan | Ton | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tungkal Ilir | 26.582 | 24.465 | 25.541 | 18.604 | 24.497 |
| Bramitam | 14.402 | 11.833 | 13.395 | 13.702 | 11.848 |
| Sebrang Kota | 6.846 | 6.351 | 6.948 | 6.773 | 6.684 |
| Betara | 6.899 | 5.858 | 6.768 | 6.045 | 5.662 |
| Kuala Betara | 19.669 | 18.599 | 19.830 | 18.909 | 19.475 |
| Pengabuan | 27.389 | 21.394 | 33.872 | 32.263 | 23.090 |
| Senyerang | 28.866 | 16.807 | 32.048 | 30.601 | 17.720 |
| Tungkal Ulu | 10.559 | 11.230 | 11.504 | 11.592 | 11.217 |
| Batang Asam | 33.776 | 29.708 | 38.911 | 40.980 | 30.573 |
| Tebing Tinggi | 29.460 | 29.276 | 29.957 | 35.809 | 25.035 |
| Merlung | 29.944 | 35.919 | 35.415 | 34.928 | 14.906 |
| Muara Papalik | 34.332 | 34.971 | 32.123 | 32.221 | 28.181 |
| Renah Mendaluh | 17.917 | 14.894 | 15.209 | 16.231 | 11.429 |
| Tanjung Jabung Barat | 286.641 | 261.305 | 301.522 | 298.659 | 230.316 |

Sumber: Data Diolah

Penyumbang terbesar sektor pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu daerah merlung berturut-turut dari tahun 2016-2019, akan tetapi pada tahun 2020 Kecamatan Muara Papalik menduduki peringkat teratas penyumbang sektor pertanian terbesar yaitu 28.181 ton. Sedangkan penyumbang sektor terkecil yaitu pada kecamatan Betara dan Sebrang Kota.

Menurut peneltian Rosmeli (2014) menyebutkan perekonomian daerah menjadi baik tidak semata-mata dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan

ekonomi. Beliau berpendapat di mana pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan menurunnya inflasi maka menimbulkan ketidakmerataan antar daerah, dengan ini tujuan diberlakukannya otonomi daerah desentralisasi fiskal yakni mewujudkan pemerataan antar daerah serta kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah yang mungkin terjadi semampu mungkin diperendah dengan direalisasikannya pembangunan daerah secara selaras dan terpadu sebagaimana dengan potensi daerah.

Meskipun kabupaten Tanjung Jabung Barat diklasifikasikan sebagai daerah cepat tumbuh dan cepat maju serta sebagai penyumbang PDRB kategori pengolahan industri dan pertambangnya terbesar, Tetapi tidak menjamin pemerataan pembangunan wilayah. Sedikitnya pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menjadi permasalahan dalam upaya mengembangkan wilayah. Dengan ini maka solusi yang tepat dalam mempercepat dan pemerataan pembangunan maka perlunya penentuan pusat pertumbuhan baru, dimana fokus pemerintah diprioritaskan untuk pembangunan daerah sehingga kedepannya diharapkan pusat pertumbuhan dapat mendorong daerah belakangnya.

Hirarki perkotaan harus benar-benar diperhatikan dalam penataan ruang karena mencakup fungsi-fungsi yang perlu diorientasikan untuk setiap kota. Sebagai bagian dari dinamika perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung barat, kinerja fungsi ini terkait dengan fasilitas umum di masing-masing wilayah. Jumlah fasilitas yang dibutuhkan di setiap kota harus sepadan dengan dampak dan penggunaan lahan kota tersebut. Jumlah penduduk yang diharapkan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Sebaran penduduk dan aktivitas di beberapa wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakibatkan penambahan jumlah sarana dan prasarana pelayanan.

Penulis mencoba mengkaji dan menganalisa hal-hal yang telah dipaparkan diatas kedalam penelitian penentuan pusat pertumbuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengangkat judul penelitian yang akan dibahas

yaitu “Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Sebagai Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2.Rumusan Masalah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang memiliki perekonomian yang cukup baik, bahkan diklasifikasikan sebagai kawasan cepat tumbuh dan cepat maju, serta menjadi penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Jambi, akan tetapi perekonomiannya masih belum merata dan transfer pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak lancar, hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah yang masih terbelang cukup besar tingkat kemiskinannya. Sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Permasalahan ini tentunya bertentangan dengan harapan yang ingin dicapai yaitu pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pemerataan pembangunan wilayah, dimana solusi mengatasi persoalan tersebut salah satunya adalah dengan menentukan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam menentukan pusat pertumbuhan wilayah maka didapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kecamatan mana yang menjadi daerah pusat pertumbuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Komoditi pertanian mana yang menjadi basis di setiap Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana interaksi Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dengan Daerah dibelakangnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

1.3.Tujuan Penelitian

Dilihat dari latarbelakang dan permasalahan maka, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Untuk Mengidentifikasi Komoditi yang menjadi basis pada sektor pertanian setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Untuk mengetahui interaksi yang terjadi pada Daerah pusat pertumbuhan dengan daerah dibelakangnya

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini membawa manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai penerapatan pembelajaran selama masa perkuliahan serta sebagai preskripsi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi serta pengambilan keputusan dalam penentuan pusat pertumbuhan guna solusi dalam pengembangan wilayah